

***THE EFFECT OF HR COMPETENCIES AND IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF KUPANG
CITY LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS WITH SPI AS A
MEDIATING VARIABLE***

**PENGARUH KOMPETENSI SDM DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA
KOTA KUPANG DENGAN SPI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

**Leopold Melkiano Triangga Dawu¹, Maria Odriana Veronica Moi², Adiutrix Maria
Irayanti Seran³**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Widya
Mandira^{1,2,3}

leopolddawu@gmail.com¹, maria.veronicamoy40@gmail.com², adiutrixseran@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to assess the impact of HR Competence and SAP Implementation on the quality of Kupang City Local Government financial statements, with SPI as a mediator. This research was conducted using quantitative methods, with purposive sampling techniques. This research focused on 10 Regional Work Units of Kupang City, with a total of 50 respondents. Hypothesis testing was conducted using SmartPLS. The results showed that HR competence has a significant effect on the quality of local government financial statements, SAP implementation has a significant impact on the quality of financial statements, HR competence has a significant effect on SPI, SAP implementation has a significant effect on SPI, and the internal control system has no significant effect on the quality of financial statements. In addition, the indirect effect of HR competencies on the quality of local government financial reports through SPI was found to be insignificant, as was the effect of SAP implementation on the quality of financial reports through SPI.

Keywords: *HR Competencies, SAP Implementation, Quality of Financial Statements, SPI*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak dari Kompetensi SDM dan Implementasi SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang, dengan SPI sebagai mediator. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel purposive. Penelitian ini berfokus pada 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang, dengan total 50 responden. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, implementasi SAP memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap SPI, implementasi SAP berpengaruh signifikan terhadap SPI, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, efek tidak langsung dari kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui SPI ditemukan tidak signifikan, begitu pula dengan pengaruh implementasi SAP terhadap kualitas laporan keuangan melalui SPI.

Kata Kunci : Kompetensi SDM, Implementasi SAP, Kualitas Laporan Keuangan, SPI

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berfokus pada kebutuhan publik dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Organisasi ini sangat terkait dengan pemerintahan, yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah. Pemerintah bertanggung

jawab untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Dalam praktiknya, organisasi sektor publik kini semakin terfokus pada penguatan akuntabilitas atas kinerja organisasi tersebut.

Pemerintah diharapkan untuk melakukan tata kelola yang lebih baik, terutama dalam penyampaian informasi keuangan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pemerintah dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintah tersebut. Penyajian laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Indikator kualitas laporan keuangan mencakup relevansi, keandalan, perbandingan, dan kemudahan pemahaman. Oleh karena itu, laporan keuangan daerah harus disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, yang kemudian akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan penilaian berupa opini (Rahayu, 2014).

Contoh data berikut menunjukkan opini yang diperoleh pemerintah daerah Kota Kupang pada dua tahun terakhir, yakni 2020 dan 2021, yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pada tahun 2020, Kota Kupang mendapatkan opini WTP, namun BPK masih menemukan beberapa masalah, yaitu: (1) Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal pada tiga organisasi perangkat daerah, (2) Penatausahaan aset tetap yang belum tertib. Pada tahun 2021, Kota Kupang kembali memperoleh opini WTP, meskipun masih ditemukan beberapa masalah, yaitu: (1) Pengelolaan pendapatan yang belum memadai, (2)

Pengelolaan aset tetap yang belum memadai, (3) Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal pada dua organisasi perangkat daerah.

Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut, ditemukan bahwa masalah utama terletak pada lemahnya sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lemahnya sistem pengendalian internal membuka peluang bagi individu yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBD dan APBN. Indikator dalam sistem pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta evaluasi (Sejarwani, 2015). Untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang harus memiliki sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman pelatihan, dan pengalaman kerja di bidang keuangan. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan individu dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan (Yendrawati, 2013).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariyanto (2020) dan Hermawan (2022), yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian Sroyono dkk (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah memainkan peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Bukti empiris dari penelitian Hermawan (2022) dan Rahmadani serta Zulaika

(2023) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian Hasanah dan Rumondang (2021) menunjukkan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan pencatatan keuangan, dimana laporan keuangan berisikan segala macam transaksi yang telah terjadi. Segala macam transaksi-transaksi dan posisi keuangan akan disajikan secara terstruktur oleh suatu entitas pelaporan. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai laporan keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai kinerja entitas, dan dalam membuat serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi dana. Laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tujuan dan juga mempunyai peran prediktif, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dan untuk operasi yang berkelanjutan serta resiko yang terjadi. Informasi laporan keuangan disajikan secara relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak sepenuhnya memenuhi tujuan dari laporan keuangan tersebut.

2. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta dapat mengoreksi hasil evaluasi masa lalu. Informasi relevan harus tepat waktu, memiliki manfaat umpan balik, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dari laporan keuangan bebas dari kesalahan material, menyajikan fakta sejujur-jujurnya, dapat diverifikasi, dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna harus memiliki pengetahuan yang memadai.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Edison, Arwan dan Komariyah (2016:142) kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintah Daerah mendefinisikan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna.

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam pasal 1 angka 3 mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015, dalam penutup disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ini berlaku maka dengan demikian peraturan lama dicabut.

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan beberapa macam laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Laporan Operasional (LO).

Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas.

- c. Neraca.
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL).
Laporan perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- f. Laporan Arus Kas.
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir dari kas pemerintah daerah selama satu periode tertentu.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Laporan Arus Kas.

6. Sistem Pengendalian Internal

Pada Undang-Undang Nomor 60 tahun 2008 pasal 3 tentang sistem pengendalian internal pemerintah terdapat 5 indikator diantaranya :

1) Lingkungan Pengendalian

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman maka perlu dilaksanakannya sistem pengendalian internal di dalam sebuah instansi.

Guna memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor perlu mempertimbangkan sub komponen dari lingkungan pengendalian itu sendiri, yaitu:

- a. Integritas dan nilai-nilai etis.
- b. Komitmen pada kompetensi.
- c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit.
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
- e. Struktur organisasi.

2) **Penilaian Risiko.**

Penilaian risiko yaitu identifikasi risiko dan analisis rasio. Menurut COSO dalam Sambara (2018:17) menyatakan terdapat empat prinsip yang mendukung penilaian risiko, yaitu sebagai berikut:

- a) Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko.
- b) Organisasi mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan diseluruh entitas dan menganalisa risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c) Organisasi mempertimbangkan potensi terjadinya *fraud* atau kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
- d) Organisasi mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.

3) **Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk memberikan tanggapan yang efektif dari resiko yang ada. Kegiatan pengendalian dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pemisahan tugas yang memadai.
- b. Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas.
- c. Dokumen dan catatan yang memadai.
- d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.
- e. Pemeriksaan independen atas kinerja.

4) **Informasi dan Komunikasi**

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Menurut COSO dalam Sambara (2018:18) terdapat dua prinsip dalam penerapan pengendalian internal yang dapat mendukung informasi dan komunikasi yang lebih baik

5) **Pemantauan**

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas. Menurut COSO dalam Sambara (2018:18) terdapat dua prinsip dalam pengendalian internal yang dapat mendukung komponen *monitoring* lebih baik,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kota Kupang dengan responden terdiri dari pegawai bagian keuangan di beberapa dinas, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas PMPTSP. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang ada pada instansi terkait, seperti bagian keuangan di dinas-dinas Kota Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Total populasi terdiri dari 40 SKPD di Kota Kupang, dengan

jumlah pegawai sebanyak 238 orang. Penentuan sampel menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016:85). Sampel yang diambil berjumlah 50 orang. Metode purposive sampling dipilih karena data yang diperlukan berasal dari responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan peneliti.

Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria untuk SKPD:

1. SKPD yang berada di wilayah Kota Kupang.
2. SKPD yang memiliki masalah tertentu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kriteria untuk Responden Individu:

1. Pegawai aktif yang bertugas di dinas-dinas Kota Kupang dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan.
2. Responden tidak dibatasi oleh latar belakang pendidikan, selama mereka bekerja di bagian keuangan di dinas-dinas Kota Kupang.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	SKPD	Jumlah Pegawai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 orang
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 orang
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 orang
4	Dinas Koperasi dan UMKM	5 orang
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	5 orang
6	Dinas Pertanian	5 orang
7	Dinas Kesehatan	5 orang
8	Dinas Perhubungan	5 orang
9	Dinas Ketahanan Pangan	5 orang
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5 orang
Jumlah		50 Orang

Sumber: data diolah

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui

pembagian kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner yang disebarakan berisi daftar pernyataan terkait objek penelitian, dilengkapi dengan penjelasan mengenai tujuan penelitian. Penyusunan kuesioner menggunakan skala Likert berdasarkan panduan dari Sugiyono (2018:152) dengan rentang skor 1-5, di mana:

- Skor 5 berarti *sangat setuju*,
- Skor 4 berarti *setuju*,
- Skor 3 berarti *kurang setuju*,
- Skor 2 berarti *tidak setuju*,
- Skor 1 berarti *sangat tidak setuju*.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan perangkat lunak **SmartPLS versi 4**. Setiap hipotesis yang diajukan dianalisis dengan SmartPLS untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. Jadwal penelitian dibuat dalam bentuk tabel

Tabel 3.5 Predikat dan Rentang Nilai Uji Deskriptif

No	Pencapaian Maksimum	Skor	Kategori Sikap/Predikat
1	84-100		Sangat setuju/sangat baik
2	68-83		Setuju/baik
3	52-67		Cukup setuju/cukup baik
4	36-51		Kurang setuju/kurang baik
5	20-36		Tidak setuju/tidak baik

Sumber: Levis (2013:108)

Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran menggambarkan hubungan antara setiap indikator dengan variabel laten yang diwakilinya. Dalam aplikasi **SMARTPLS**, pengujian validitas dilakukan melalui *convergent validity* dan *discriminant validity*, sementara pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan **composite reliability** dan **cronbach's alpha**.

Uji Validitas

1. Convergent Validity

Convergent validity dievaluasi menggunakan nilai *outer loading*. Suatu indikator dinyatakan

yang dapat disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang dilakukan.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sujarweni (2014:105), analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik data yang diolah pada setiap variabel. Analisis ini dilakukan dengan menghitung persepsi responden, sebagaimana dijelaskan oleh Levis (2013:108), menggunakan rumus yang relevan untuk penelitian ini.

$$Ps-p = \left(\frac{\bar{X}^{Ps-p}}{5} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

Ps-p = Kategori persepsi

Xs-p = Rata-rata skor untuk persepsi populasi

5 = Skor tertinggi *skala*

likert

memenuhi kriteria *convergent validity* jika nilai *outer loading* > 0,7, yang menunjukkan bahwa data valid (Hair et al., 2019). Selain itu, menurut Sarstedt et al. (2017), nilai AVE (Average Variance Extracted) suatu variabel > 0,5 menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% variasi itemnya, sehingga memenuhi kriteria *convergent validity*.

2. Discriminant Validity

Discriminant validity dinilai berdasarkan *cross loading* antara skor item atau indikator dengan konstruksya. Evaluasi ini memastikan bahwa setiap item memiliki korelasi lebih tinggi

dengan variabel yang diukur dibandingkan dengan variabel lain. Menurut Ghazali & Latan (2015), jika kondisi tersebut terpenuhi, maka *discriminant validity* dapat dianggap baik.

Uji Reliabilitas

1. Composite Reliability

Uji *composite reliability* dilakukan untuk memastikan reliabilitas indikator variabel. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* > 0,7 (Ghozali & Latan, 2014).

2. Cronbach's Alpha

Cronbach's alpha digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Nilai Cronbach's alpha > 0,7 menunjukkan bahwa variabel yang diukur memiliki reliabilitas yang baik, dan uji ini mendukung hasil dari *composite reliability*.

Model Struktural (Inner Model)

Pengujian model struktural dilakukan untuk mengevaluasi hubungan dan pengaruh antar konstruk, nilai signifikansi, serta nilai R-square dari model penelitian. Model ini dinilai menggunakan R-square dan f-square.

1. R-square (R²)

R-square digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel

dependen. Kategori nilai R² menurut Ghazali & Latan (2015) adalah:

- R² ≥ 0,75: pengaruh kuat,
 - R² ≥ 0,50: pengaruh sedang,
 - R² ≥ 0,25: pengaruh lemah.
- Semakin tinggi nilai R², semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sehingga model menjadi lebih baik.

2. F-square (f²)

Nilai f-square digunakan untuk menilai pengaruh relatif variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria nilai f² menurut Ghazali & Latan (2015):

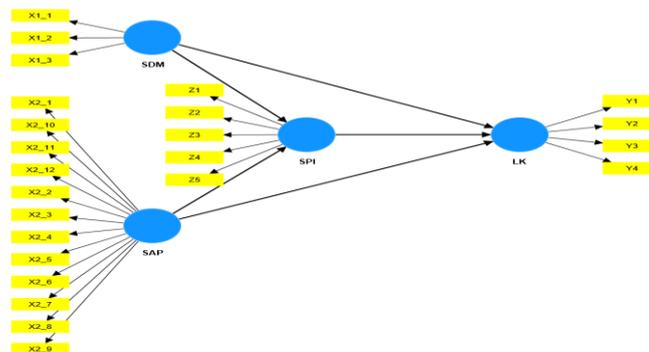
- f² ≥ 0,35: pengaruh besar,
- f² ≥ 0,15: pengaruh sedang,
- f² ≥ 0,02: pengaruh lemah.

Pengujian Hipotesis - Bootstrapping

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai *t-statistic* dan *p-value*. Berdasarkan Muniarti et al. (2013), dengan tingkat signifikansi 5% (*alpha* 0,05), nilai *t-statistic* yang signifikan adalah > 1,96. Jika nilai *t-statistic* > 1,96, maka hipotesis diterima. Untuk nilai *p-value*, kriteria signifikansi adalah:

- *p-value* < 0,05: pengaruh signifikan,
- *p-value* > 0,05: pengaruh tidak signifikan.

Berikut adalah diagram jalur penelitian untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel.



Gambar 1. Diagram Jalur

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Berikut adalah hasil analisis deskriptif berdasarkan persepsi responden:

1. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil persepsi responden mengenai kualitas laporan keuangan ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2. Persepsi Responden Kualitas Laporan Keuangan

No	Indikator	Skala likert					Rata-Rata Skor (\bar{X}_{s-p})	Kategori Persepsi (Ps _p)(%)	Kategori
		SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)			
1	Y1	20	27	1	2	0	4,3	86	Sangat Baik
2	Y2	19	28	1	2	0	4,28	85,6	Sangat Baik
3	Y3	16	33	1	0	0	4,3	86	Sangat Baik
4	Y4	16	33	1	0	0	4,3	86	Sangat Baik
Hasil Akhir							4,295	85,9	Sangat Baik

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel, rata-rata skor persepsi responden adalah 4,295, yang menunjukkan bahwa tingkat persepsi responden terhadap kualitas laporan keuangan mencapai 85,9% dan masuk dalam kategori sangat baik. Tingginya kualitas laporan keuangan ini

mencerminkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memiliki karakteristik yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

Tabel 3. Persepsi Responden Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Skala Likert					Rata-Rata Skor (\bar{X}_{s-p})	Kategori Persepsi (Ps _p)(%)	Kategori
		SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)			
1	X _{1.1}	5	7	25	12	1	3,06	61,2	Cukup Baik
2	X _{2.2}	2	21	11	16	0	3,18	63,6	Cukup Baik
3	X _{3.3}	2	21	11	16	0	3,18	63,6	Cukup Baik
Hasil Akhir							3,14	62,8	Cukup Baik

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa rata-rata skor responden adalah 3,14, sehingga persepsi responden tentang nilai informasi kompetensi sumber daya manusia adalah 62,8% dan dikategorikan cukup baik. Kompetensi sumber daya manusia yang masih dalam kategori cukup baik menunjukkan bahwa subbagian keuangan harus meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang tugas yang diberikan sehingga dapat berjalan dengan baik.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) Hasil output dari persepsi responden tentang penerapan standar akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Persepsi Responden Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

No	Indikator	Skala likert					Rata-rata skor (\bar{X}_{s-p})	Kategori Persepsi (Ps _p)(%)	Kategori
		SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)			
1	X _{2.1}	1	31	3	15	0	3,36	67,2	Cukup Baik
2	X _{2.2}	1	31	3	15	0	3,36	67,2	Cukup Baik

3	X _{2,3}	1	40	2	7	0	3,7	74	Baik
4	X _{2,4}	12	36	1	1	0	4,18	83,6	Baik
5	X _{2,5}	6	37	1	6	0	3,86	77,2	Baik
6	X _{2,6}	16	29	1	5	0	4,18	83,6	Baik
7	X _{2,7}	11	37	1	1	0	4,16	83,2	Baik
8	X _{2,8}	8	35	0	7	0	3,88	77,6	Baik
9	X _{2,9}	5	41	1	4	0	4	80	Baik
10	X _{2,10}	3	46	1	0	0	4,04	80,8	Baik
11	X _{2,11}	4	44	0	2	0	4	80	Baik
12	X _{2,12}	9	33	1	0	0	3,9	78	Baik
Hasil akhir							3,885	77,7	Baik

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata skor untuk persepsi responden adalah 3,88, sehingga persepsi responden tentang penerapan standar akuntansi pemerintah adalah 77,6% dan dikategorikan baik. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang dikategorikan baik menunjukkan bahwa subbagian keuangan memiliki

staf yang cukup baik sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

4. Sistem Pengendalian Internal (Z)
Hasil output dari persepsi responden berdasarkan variabel sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Persepsi Responden Sistem Pengendalian Internal

No	Indikator	Skala likert					Rata-rata skor ($\bar{X}_{s,p}$)	Kategori Persepsi ($P_{s,p}$)(%)	Kategori
		SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS (1)			
1	Z1	14	30	6	0	0	4,16	83,2	Baik
2	Z2	11	32	7	0	0	4,08	81,6	Baik
3	Z3	9	38	4	0	0	4,18	83,6	Baik
4	Z4	22	22	6	0	0	4,32	86,4	Sangat Baik
5	Z5	22	22	6	0	0	4,32	86,4	Sangat Baik
Hasil Akhir							4,212	84,24	Sangat Baik

Sumber : Hasil Olahan Microsoft Excel Berdasarkan tabel 5.7, dapat dilihat bahwa rata-rata persepsi nilai adalah 4,212, sehingga persepsi responden tentang nilai sistem pengendalian internal adalah 84,24% dan dikategorikan sangat baik. Sistem pengendalian internal yang sangat baik menunjukkan bahwa adanya pengendalian internal yang efektif dari kepala bagian keuangan, sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Model Struktural (Inner Model)

1. R-square (R²) R-square (R²) digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R² yang tinggi menunjukkan pengaruh yang kuat, sedangkan nilai R² yang rendah menunjukkan pengaruh yang lemah. Secara spesifik, nilai R² 0,75

menunjukkan pengaruh yang kuat, 0,50 menunjukkan pengaruh yang sedang, dan 0,25 menunjukkan pengaruh yang lemah. Semakin tinggi nilai R-square, semakin besar variabel eksogen dapat menjelaskan variabel endogen, sehingga semakin baik persamaan strukturalnya (Ghozali & Latan, 2015). Hasil output dari R-square (R²) adalah sebagai berikut:

Tabel 6. R-square (R²).

	R-square	R-square adjusted
LK	0.431	0.394
SPI	0.382	0.356

Sumber : Hasil SmartPLS Edisi 4

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai R-Square untuk variabel Laporan Keuangan (LK) adalah 0,431 dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah 0,382, yang termasuk dalam kategori pengaruh lemah. Ini berarti bahwa semua variabel yang terlibat

dalam model hanya dapat menjelaskan variabel LK sebesar 43,1%, dengan 56,9% sisanya tidak dapat dijelaskan, dan variabel SPI sebesar 38,2%, dengan 61,8% sisanya tidak dapat dijelaskan.

2. F-square (f^2) F-square digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh relative dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai f^2 yang rendah menunjukkan pengaruh yang lemah, sedangkan nilai f^2 yang tinggi menunjukkan pengaruh yang besar. Secara spesifik, nilai f^2 0,02 menunjukkan pengaruh yang lemah, 0,15 menunjukkan pengaruh yang sedang, dan 0,35 menunjukkan pengaruh yang besar atau baik (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 7. F-square (f^2)

	LK	SAP	SDM	SPI
LK				
SAP	0.206			0.272
SDM	0.097			0.118
SPI	0.015			

Sumber : Hasil SmartPLS Edisi 4

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F-square sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap variabel Laporan Keuangan (LK) adalah 0,097, yang termasuk dalam kategori lemah.
2. Pengaruh variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap variabel Laporan Keuangan (LK) adalah 0,206, yang termasuk dalam kategori sedang.
3. Pengaruh variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap

variabel Laporan Keuangan (LK) adalah 0,015, yang termasuk dalam kategori lemah.

4. Pengaruh variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah 0,272, yang termasuk dalam kategori sedang.
5. Pengaruh variabel Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah 0,118, yang termasuk dalam kategori sedang.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap variabel Laporan Keuangan (LK) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) bervariasi, dengan beberapa variabel memiliki pengaruh lemah dan beberapa variabel memiliki pengaruh sedang.

Pengujian Hipotesis-Bootstrapping

Pengujian Hipotesis dengan Metode Bootstrapping Hasil output menunjukkan bahwa nilai p-values yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut signifikan, sedangkan nilai p-values yang lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh variabel tersebut tidak signifikan. Dalam pengujian hipotesis ini, penelitian menggunakan tingkat alpha 5%, sehingga nilai kritis untuk t-statistic adalah 1,96. Jika nilai t-statistic lebih besar dari 1,96, maka hipotesis dapat diterima dengan tingkat signifikansi yang signifikan. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat secara langsung pada tabel yang disajikan.

Tabel 8. Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values
SDM-LK	0.269	0.290	0.129	2.259	0.019
SAP - LK	0.418	0.417	0.105	3.989	0.00
SDM - SPI	0.292	0.290	0.129	2.259	0.024

SAP- SPI	0.444	0.449	0.076	5.877	0.00
SPI -> LK	0.118	0.131	0.143	0.827	0.409

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS Edisi 4

a. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 2,341 ($>1,96$) dan p-value 0,019 ($<0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa individu yang kompeten dalam pembuatan laporan keuangan, dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan sikap yang sesuai, dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Kompetensi yang tinggi berkontribusi pada kualitas laporan keuangan daerah yang lebih baik. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi meningkatkan kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai t-statistik sebesar 3,986 ($>1,96$) dan p-value 0 ($<0,05$). Penerapan yang baik berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 memastikan laporan keuangan memenuhi karakteristik relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan, sehingga kualitas laporan meningkat. Standar akuntansi pemerintah yang diterapkan dengan baik meningkatkan kualitas laporan keuangan.

c. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pengendalian Internal

Kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal, dengan nilai t-statistik sebesar 2,259 ($>1,96$) dan p-value 0,024 ($<0,05$). Kompetensi yang tinggi meningkatkan efektivitas pengendalian internal pemerintah, yang merupakan elemen penting bagi keberhasilan suatu entitas. Kompetensi sumber daya manusia yang tinggi meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

d. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Sistem Pengendalian Internal

Standar akuntansi pemerintah menunjukkan pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal, dengan nilai t-statistik sebesar 5,877 ($>1,96$) dan p-value 0 ($<0,05$). Penerapan standar ini yang diawasi oleh lingkungan pengendalian memastikan laporan keuangan tersusun sesuai prinsip akuntansi dan berguna bagi penggunaannya. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

e. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai t-statistik 0,827 ($<1,96$) dan p-value 0,409 ($>0,05$). Namun, penerapan elemen-elemen pengendalian internal seperti penilaian risiko, pemantauan, dan komunikasi sudah berjalan baik, sehingga tetap menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem

pengendalian internal tidak signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan tetapi tetap berkontribusi dalam pengawasannya.

Tabel 9. *Spesific indirect effects*

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T statistics (O/STDEV)</i>	<i>P values</i>
SDM -> SPI -> LK	0.035	0.033	0.045	0.765	0.444
SAP -> SPI -> LK	0.052	0.059	0.067	0.783	0.434

Sumber : Hasil Pengolahan Data SmartPLS Edisi

a. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan tabel 5.17, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal memiliki nilai t-statistik 0,765 (<1,96) dan p-value 0,444 (>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini karena sistem pengendalian internal pada organisasi publik dinilai sudah sangat baik sehingga tidak memiliki peran signifikan sebagai mediator. Sistem pengendalian internal tidak memediasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Sistem Pengendalian Internal

Tabel 5.17 juga menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal memiliki nilai t-statistik 0,789 (<1,96) dan p-value 0,434 (>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem

pengendalian internal tidak dapat memediasi pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun elemen-elemen sistem pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik, perannya sebagai mediator dalam hubungan ini tidak signifikan. Sistem pengendalian internal tidak memediasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan.

**PENUTUP
Kesimpulan**

Penelitian pada SKPD Kota Kupang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Namun, sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan tidak mampu memediasi hubungan antara kedua variabel tersebut dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan, meskipun peran sistem pengendalian internal sebagai mediator belum signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Sanusi. 2020. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018*. *Jurnal Valuta* 6(1), April : 2020.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hermawan, R. Alisha. 2022. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020*. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2(2), Februari: 304-315.
- Levis, L. Rafael. 2013. *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Philadelphia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *J-ISCAN-Journal Of Islamic Accountung Research: Vol. 2 No.1* (P-ISSN: 2721-5474), 17-35.
- Rahayu, S. K. & Suhayati, E. (2013). *Auditing konsep dasar dan pedoman pemeriksaan akuntan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Yendrawati, R. (2013). *Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan factor eksternal sebagai variabel moderating*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 166–175
- Rahmadani, D. Putri & Nurfitri Zulaika. 2023. *Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2 (1), 20a23 : 163-170
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Diakses pada 5 Maret 2023. <http://djpk.kemenkeu.go.id>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Jakarta: Alfabeta.